

## Studi Naratif Politisi Muhammadiyah pada Era Orde Lama Hingga Orde Baru (Biografi Abdul Wahab Radjab)

Hadisaputra<sup>1\*</sup>, Mustari Bosra<sup>2</sup>, Andi Asywid Nur<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Pendidikan Sosiologi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

\*e-mail korespondensi: hadisaputra@unismuh.ac.id

*Received 24 August 2022; Received in revised form 25 August 2022; Accepted 25 August 2022*

### Abstrak

Selama ini, studi yang membahas politisi berlatar belakang Muhammadiyah hanya berkisar pada tokoh di level Pusat. Sementara, politisi Muhammadiyah di tingkat lokal, jarang dibahas dalam riset terdahulu. Abdul Wahab Radjab merupakan politisi berlatarbelakang Muhammadiyah yang pernah menduduki posisi sebagai Ketua DPRD Kota Makassar pada Era Orde Lama dan Anggota DPR/MPR RI pada masa Orde Baru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi naratif. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian berhasil memotret biografi Abdul Wahab Radjab sejak masa kecil pada masa penjajahan Jepang, hingga perjalanan hidupnya menjalani karir politik sebagai politisi di Senayan.

**Kata kunci:** Abdul Wahab Radjab, Politisi Muhammadiyah, Orde Lama, Orde Baru.

### Abstract

*So far, studies that discuss politicians with Muhammadiyah backgrounds only revolve around figures at the central level. Meanwhile, Muhammadiyah politicians at the local level were rarely discussed in previous research. Abdul Wahab Radjab is a politician with a Muhammadiyah background who has held the position as Chairman of the Makassar City DPRD in the Old Order Era and a Member of the DPR/MPR RI during the New Order. This research is a type of qualitative research with a narrative study approach. Data collection techniques with document studies, and interviews. The results of the study succeeded in photographing the biography of Abdul Wahab Radjab from his childhood during the Japanese colonial period, until his life journey through a political career as a politician in Senayan.*

**Keywords:** Abdul Wahab Radjab, Muhammadiyah politician, Old Order, New Order.

### PENDAHULUAN

Muhammadiyah bukan organisasi politik atau partai politik, tapi persyarikatan ini memiliki kontribusi cukup besar dalam dinamika politik kebangsaan. Beberapa tokoh elit yang secara aktif memperjuangkan Muhammadiyah sejak era pergerakan nasional, seperti Ahmad Dahlan, Abdul Kahar Muzakir, Sudirman, Mr. Kasman Singodimejo, hingga tokoh belakang seperti Amien Rais hingga

Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beberapa tokoh tersebut telah memberikan kontribusi politik berbasis budaya politik Muhammadiyah (Suwarno, 2010).

Relasi Muhammadiyah dengan politik sepanjang sejarah Indonesia telah dikaji cukup banyak peneliti. Studi tersebut antara lain, kiprah politik Muhammadiyah pra kemerdekaan (Maarif, 1995), era Orde Lama (Syaifullah 1997), Orde Baru (Syamsuddin, 1995; Taba, 1996;

Tebba, 1993), hingga pascareformasi (Jurdi, 2011; Qadir dkk., 2015; Sholikin, 2018). Termasuk kajian yang khusus membahas relasi Muhammadiyah dan politik di Sulawesi Selatan, diulas Fatmawati (2014) dan Suratman (2017). Namun belum banyak kajian yang mengulas studi Biografi politisi berlatar belakang Muhammadiyah, khususnya di tingkat lokal.

Penelitian ini akan mengkaji tentang Abdul Wahab Radjab yang merupakan politisi berlatar belakang Muhammadiyah yang pernah menduduki posisi sebagai Ketua DPRD Kota Makassar pada Era Orde Lama dan Anggota DPR/MPR RI pada masa Orde Baru. Penelitian ini penting, sebagai bagian dari upaya menemukan model ideal relasi Muhammadiyah dan Politik.

Dalam studi sebelumnya, Kaharuddin dkk. (2019) menyimpulkan bahwa secara normatif, sikap politik Muhammadiyah dalam berbagai kontestasi politik, termasuk Pemilu 2019, tetap konsisten, yaitu bersikap netral. Namun netralitas itu memiliki beragam penafsiran, ada netralitas pasif dan aktif. Netralitas pasif yang dikenal dengan semboyan 'menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik' dikritik karena terkesan Muhammadiyah anti-politik. Sebaliknya, netralitas aktif, yang mengusung slogan 'menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik' juga dapat membuat Muhammadiyah

terjebak dalam kubangan politik praktis. Dilema yang dihadapi, bagaimana operasionalisasi sikap netral sekaligus aktif, tidak berpihak pada kekuatan politik tertentu, namun aktif menyuarakan nilai-nilai politik adiluhung.

Dalam Pemilu 2019, Kaharuddin dkk (2019) menemukan bahwa 'netralitas aktif' di kalangan Pimpinan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan dimaknai dengan memberikan 'affirmative action' bagi kader-kadernya yang ingin terjun ke dunia politik. Model dukungan tersebut bermacam-macam, misalnya dalam bentuk rekomendasi (Bagi kader Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah-DPD), hingga dukungan kultural bagi kader yang maju sebagai Caleg DPR/DPRD.

Dalam Pemilihan DPD, Muhammadiyah di Sulawesi Selatan menunjukkan keberpihakan terhadap Calon Anggota DPD secara terbuka, baik melalui atribut kampanye, maupun melalui media massa. Sikap ini tetap dianggap sebagai 'netralitas', sebab Calon DPD bukan perwakilan partai politik. Mengusung Calon Anggota DPD dari Muhammadiyah tidak akan mencederai komitmen Muhammadiyah untuk menjaga 'kedekatan yang sama' dengan semua partai politik.

Sebaliknya, dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota DPR/DPRD, netralitas tetap ditunjukkan dengan sikap normatif. Meski demikian, adanya 'sinyal' penggalangan dukungan

secara kultural, baik dalam Pemilihan Presiden, maupun dalam Pemilihan Anggota DPR/DPRD, tetap bisa terlihat pada level akar rumput Muhammadiyah. Dukungan kultural tersebut, misalnya terkuak dengan ungkapan 'mendukung Capres pilihan ulama', atau 'mendukung kader Muhammadiyah yang nyaleg di partai manapun, kecuali pada partai anti Islam' (Kaharuddin, dkk., 2019).

Penelitian ini berupaya melakukan penelusuran historis, model relasi Muhammadiyah dan politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Mengkaji Biografi Abdul Wahab Radjab dianggap tepat memotret relasi tersebut pada kedua masa periodisasi politik itu.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan studi tokoh atau biasa disebut dengan penelitian tokoh atau penelitian riwayat individu (*individual life history*). Penelitian studi tokoh ini masuk dalam salah satu model penelitian kualitatif. Dalam studi tokoh, metode yang digunakan untuk meneliti subjek penelitian akan mempengaruhi cara peneliti memandang subjek tersebut. Jika subjek dipandang oleh peneliti berdasarkan angka atau kriteria tertentu, maka peneliti akan kehilangan sifat subjektif perilaku manusiawi sang tokoh. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat mengenal lebih jauh dan mendalam mengenai sang tokoh secara pribadi dan melihat dia mengembangkan definisinya

sendiri tentang dunia dengan berbagai pemikiran, karya, dan perilaku yang dijalannya. Peneliti dapat merasakan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diucapkan sang tokoh dalam pergulatan dengan komunitasnya (Furchan, dan Maimun, 2005).

Dalam studi tokoh yang dilakukan oleh peneliti, disini peneliti menggunakan tiga macam domain yaitu domain ontology, domain epistemologi, dan domain aksiologi. Domain ontologi (hakekat) terdiri atas enam jenis yaitu (1) alamiah, maksudnya disini ialah studi tokoh harus dilakukan apa adanya, tanpa ada rekayasa atau manipulasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap sang tokoh atau narasumber sehingga pikiran, tindakan, dan karya sang tokoh atau narasumber merupakan realitas obyektif dari narasumber itu sendiri, (2) induktif, maksudnya disini ialah teori, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dibangun peneliti didasarkan pada data yang diperoleh, (3) proses orientasi, berorientasi pada proses, maksudnya adalah dalam melakukan studi tokoh, peneliti harus cermat, teliti, dan terus menerus mengikuti kaidah-kaidah studi tokoh, tanpa harus mempertimbangkan hasil yang ingin dicapai terlebih dahulu karena hasil itu sebenarnya merupakan produk dari suatu proses, (4) komitmen bersama, yakni data yang diperoleh oleh peneliti, sebelum dilaporkan secara lengkap, harus dirundingkan bersama

dengan informan, (5) emik-etik, maksudnya adalah dalam melakukan analisis atau penafsiran, peneliti harus menempatkan narasumber dalam perspektif sosial-budayanya, bukan perspektif peneliti sendiri. Dengan demikian makna yang diambil adalah berdasarkan realitas kehidupan narasumber itu sendiri, dan (6) *verstehen*, maksudnya disini ialah peneliti diharapkan mampu mengeluarkan kembali, dalam pikirannya sendiri, perasaan, motif, dan pikiran-pikiran yang ada di balik tindakan narasumber (Furchan, 1992).

Domain epistemologi (cara) terdiri atas delapan pendekatan yaitu, (1) pendekatan historis, maksudnya disini ialah studi tokoh pada dasarnya mengungkapkan sejarah seseorang. Oleh karenanya, studi tokoh harus mengungkapkan kaidah-kaidah kesejarahan yang tidak lepas dari ruang dan waktu beserta fakta-fakta sejarahnya. (2) pendekatan sosio-kultural-religius, maksudnya disini ialah dalam melakukan studi tokoh, peneliti tidak bisa melepaskannya dari konteks sosio-kultural-religi sang tokoh atau narasumber, karena pada dasarnya segala perasaan, pikiran, dan tindakan narasumber merupakan refleksi dari sosio-kultural-religi tokoh atau narasumber tersebut. (3) prosedural, yakni studi tokoh harus dilakukan secara berurutan (runtut), baik dilihat dari urutan waktu atau pun fokus studi. Dengan demikian deskripsi studi ini

bersifat linier. (4) partisipatoris, yakni keterlibatan peneliti dalam melakukan studi harus partisipatif, apalagi yang menjadi narasumber masih hidup. Dengan demikian studi yang dilakukan akan betul-betul memberi makna substantif karena ada keterlibatan perasaan yang hadir dan penghayatan yang mendalam dari peneliti terhadap narasumber. (5) deskriptif kualitatif, yakni studi tokoh pada dasarnya merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang berusaha untuk mendeskripsikan narasumber berdasarkan data kualitatif. (6) reflektif, yakni dalam melakukan studi, penelitian harus mampu memberikan respon secara cepat baik dengan lisan maupun tulisan, sehingga persoalan-persoalan yang muncul di lapangan berkaitan dengan narasumber dapat diselesaikan secara cepat dan data yang diperoleh semakin lengkap. (7) *Indepth* (mendalam), yakni studi tokoh akan lebih bermakna jika memfokuskan dengan masalah-masalah yang spesifik mengenai kehebatan narasumber, tanpa harus mengungkapkan secara keseluruhan dari narasumber. Dengan demikian studi yang dihasilkan akan lebih mendalam dan dapat mengungkapkan kehebatan narasumber secara tuntas. (8) Kritis-analitis, yakni sebagai sebuah penelitian ilmiah, studi tokoh harus mampu mengungkap kelebihan dan kekurangan narasumber secara kritis, tanpa harus kehilangan rasa obyektif (Furchan, dan Maimun, 2005).

Domain aksiologi (nilai guna atau manfaat), terdiri atas tiga kategori antara lain (1) keteladanan, yakni orang-orang yang membaca hasil studi tokoh harus dapat mengambil hikmah dari tindakan-tindakan narasumber yang bernilai positif, sehingga tindakan-tindakan tersebut dapat dijadikan teladan dalam kehidupan dan dalam pengembangan keilmuan (2) introspeksi, yakni bagi narasumber yang masih hidup, studi yang dilakukan oleh peneliti akan dapat dijadikan bahan introspeksi bagi dirinya dalam melakukan aktifitas kehidupan berkaitan dengan ilmu atau keahlian yang dimilikinya. Demikian juga bagi peneliti, melalui studi tokoh ini ia akan dapat melakukan introspeksi diri apabila dalam melakukan studi menemukan kejanggalan yang berbeda dari sesuatu pada umumnya, (3) memberikan sumbangan keilmuan, yakni hasil studi tokoh harus dapat menambah kajian keilmuan tertentu, baik dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, prosedur, teori maupun model yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan keilmuan selanjutnya. Disinilah pentingnya peneliti untuk jeli dalam melahirkan nilai-nilai keilmuan berdasarkan data dan fakta yang ditemui di lapangan tentang apa yang dilakukan oleh narasumber (Furchan, dan Maimun, 2005).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Studi

dokumen dilakukan dengan mengumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan baik secara pribadi maupun karya bersama (antologi) mengenai topik yang sedang diteliti (sebagai data primer). Studi dokumen juga dilakukan dengan menelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang diteliti (sebagai sumber data sekunder). Wawancara dilakukan kepada keluarga, sahabat atau orang pernah berinteraksi dengan informan. Wawancara dengan tokoh Abdul Wahab Radjab sudah tidak dapat dilakukan, sebab ia telah meninggal dunia.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Abdul Wahab Radjab dilahirkan di Dusun Balla Tabbua, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada tahun 1928. Ia adalah anak kedua dari tujuh orang bersaudara. Orang tuanya memberi nama Abdul Wahab Rajab, karena lahir pada tanggal 27 Radjab, sama dengan tanggal terjadinya peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.

Dalam autobiografinya, Abdul Wahab Radjab mengisahkan perjuangan hidupnya sejak lahir di sebuah kampung yang sepi nan terpencil di ujung utara Desa Mandalle. Nama kampung itu adalah Ballatabbua. Dusun ini termasuk dalam lingkungan Desa Mandalle, Distrik Limbung, Onderafdeling Gowa. Wahab Radjab mendeskripsikan bahwa kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan

adalah kenyataan yang dihadapi di dusun itu. Wajah-wajah cerah gembira hanya bertahan sebulan atau dua bulan sesudah panen.

Ia melukiskan kemiskinan di era penjajahan Belanda tersebut, “laki-laki, pada umumnya, hanya pakai baju bila akan pergi meninggalkan desa ke dusun lain. Selama di dusunnya sendiri, cukup menggunakan celana kolor yang tebal dan tambal sulam serta kain sarung yang juga demikian. Anak laki-laki sampai umur enam atau tujuh tahun masih saja telanjang. Perempuannya yang berumur empat atau lima tahun pun demikian. Paling-paling, pakai jempang, alat dari perak atau tembaga, sekadar menutup alat vitalnya.”

Wahab Radjab juga mengisahkan betapa beratnya penderitaan akibat penjajahan Jepang yang singkat itu. Misalnya ada kewajiban seikeree (menghormati dengan membungkukkan badan) pada tempat-tempat tertentu, apalagi bila di tempat itu ada kesatuan-kesatuan Jepang. Bila terlambat seikeree atau salah, maka dengan bengisnya serdadu Jepang akan mengatakan “bagero!” dan diiringi dengan menepeleng kiri-kanan orang tersebut, atau di pukuli dengan gagang senapan.

Penderitaan yang lebih berat, rakyat Indonesia harus mencincang bongkol pisang untuk sekadar pengganjal perut. Bahkan, untuk membawa beras tiga liter saja dari satu kampung ke kampung

lain, harus ada surat izin. Badan-badan pengumpul produksi pangan rakyat dibentuk sampai ke desa-desa. Kepada merekalah padi, jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan disetor dan dibeli dengan harga tak wajar, atau sering sekali tidak dibayar dengan slogan penghibur “Untuk kemenangan Asia Timur Raya”. Gula pasir bagaikan emas karena langka dan sulit didapatkan. Rata-rata rumah di pedesaan tidak berpelita lagi, karena tidak ada minyak tanah. Sejak Magrib sampai terbit matahari, penghuninya bergelut dengan kegelapan.

### **Berjuang Mengenyam Pendidikan**

Dalam autobiografinya, Wahab Radjab juga mengisahkan perjuangannya dalam menempuh pendidikan. Semangat untuk sekolah, pertama kali ditanamkan oleh ibunya. Ungkapan “Mau jadi apa kalau tidak sekolah?” atau “Engkau nanti dibodohi dan diperjualbelikan orang, mesti pergi sekolah”, sering dilontarkan oleh sang ibu. Ujian kebulatan tekadnya dimulai ketika mengikuti “sekolah sambungan” di *Vervolgschool* (Vvs) Limbung yang harus ditempuhnya dengan berjalan kaki sejauh 7 km setiap hari. Untunglah, ada gurunya di Limbung yang berkenan menampungnya. Setelah tamat dari *Vervolgschool* (Vvs) Limbung, ia melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Wustha Muhammadiyah di Jongaya, Kabupaten Gowa (sekarang masuk wilayah Kota Makassar). Disana pun ia mesti

menumpang pada rumah Imam Tua Jongaya, H. Abd. Samad Puang Salle.

Setelah lebih kurang dua tahun belajar di Madrasah itu, Jepang mendarat dan mengambil alih pemerintahan dari tangan Belanda. Jepang kemudian memberlakukan kebijakan “menutup semua sekolah formal.” Kebijakan inilah yang menyebabkan Madrasah Wustha Muhammadiyah, tempatnya belajar terpaksa ditutup. Semua muridnya berhenti dan kembali ke kampung masing-masing, termasuk Wahab Rajab.

Setelah Pemerintah Jepang membuka Sekolah Jam’iyah Islamiyah di Watampone, Wahab Rajab meneruskan pendidikan di sana pada tahun 1944–1945. Namun, ia juga tidak tamat, karena setelah Jepang kalah dari sekutu, sekolah ini pun bubar. Tahun 1948, ia kembali melanjutkan pendidikan di sekolah Guru Islam Menengah Atas di Makassar. Lagi-lagi, sekolah ini pun bubar pada tahun 1949, sebelum Wahab Rajab memperoleh surat tamat.

Pada tahun 1950–1952, Wahab Rajab kuliah di Universitas Muslim Indonesia, namun tidak selesai. Kali ini, penyebabnya bukan karena tempat belajarnya dibubarkan atau membubarkan diri, akan tetapi, karena ia telah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan. Untuk menambah ilmu, ia mengikuti kursus-kursus, seperti: kursus bahasa Belanda, kursus bahasa Inggris, kursus wartawan, dan kursus politik.

### **Pejuang Kemerdekaan**

Berbekal pendidikan formal yang dimiliki, Wahab Rajab menerjunkan diri ke masyarakat. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, dan Negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, Wahab Rajab tampil membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Awalnya, ia bergabung menjadi anggota Kelaskaran Pemuda-pemuda Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Watampone, Bone, pada tahun 1945.

Setelah kembali ke kampung halamannya di Limbung, Gowa, Wahab Rajab melanjutkan perjuangan menentang penjajah dengan bergabung ke dalam Kelaskaran BUKA-Limbung yang dipimpin oleh Sultan Daeng Mile. Dalam kelaskaran itu, ia duduk sebagai kepala staf. Setelah LAPRIS (Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi) terbentuk, BUKA-Limbung adalah salah satu anggota dari kelaskaran tersebut. Dalam perjuangan melawan penjajah inilah, Wahab Rajab ditangkap dan dipenjara oleh Belanda selama lebih kurang tujuh bulan (Februari–Agustus 1947).

### **Terjun Berpolitik**

Setelah lepas dari penjara, perjuangan fisik telah usai. Wahab Rajab pun menerjunkan diri dalam organisasi keagamaan, yakni Persyarikatan Muhammadiyah. Disinilah karier politiknya

bermula. Ketika Muhammadiyah memelopori lahirnya Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Wahab Radjab terlibat sebagai aktivis partai tersebut. Ia pernah tercatat sebagai Sekretaris Masyumi Makassar (1950), dan Sekretaris Masyumi Sulawesi Selatan pada tahun 1960. Sejak itulah, Wahab Radjab menjadi politisi dan memiliki pengalaman yang cukup lengkap. Ia pernah menjadi legislator di semua tingkatan legislatif, mulai dari kota, provinsi, sampai ke tingkat pusat.

Pada Pemilu tahun 1955, ia berhasil duduk di DPRD Kota Praja Makassar dari Partai Masyumi. Jumlah anggota DPRD Masyumi kala itu adalah 11 orang, dari total 25 orang Anggota DPRD. Selama di DPRD, ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Sistem pemerintahan daerah waktu itu, memosisikan DPRD sebagai lembaga legislatif (perwakilan rakyat), dan juga berperan sebagai DPD. Saat itu, Pemerintah Daerah ialah Kepala Daerah (Walikota) bersama dengan DPD, yang terdiri dari 5 orang. Anggota-anggota DPD tersebut berasal dan dipilih oleh anggota DPRD. Kepala Daerah berfungsi sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan sebagai Ketua DPD.

Ketika menjadi Anggota DPD inilah, seorang pengusaha keturunan Tionghoa pernah berkunjung ke rumahnya. Pengusaha tersebut mengajukan permohonan proyek, disertai dengan

amplop berisi uang yang bertuliskan, “untuk anak-anak di rumah”. Wahab Radjab meminta sang pengusaha mengambil kembali amplop tersebut, namun tak digubris. Oleh karena itu, amplop tersebut dilemparkannya ke wajah sang pengusaha, dan memintanya untuk keluar. Bagi Wahab Radjab, selain pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, ia pun merasa malu jika harus diadili “Rapat Pengadilan Partai” Masyumi.

Selain itu, Wahab Radjab juga pernah didapuk sebagai Ketua DPRD Kota Praja Kota Makassar. Baru setahun ia menduduki posisi tersebut, di tingkat pusat terjadi kegaduhan politik dengan kebijakan Soekarno yang akan menerapkan demokrasi terpimpin. Reaksi terhadap ide ini timbul di mana-mana. Fraksi Masyumi dalam DPRD Kota Besar Makassar pun menentukan sikap: “Secara bersama-sama, anggota-anggota Fraksi Masyumi dalam DPRD Kota Besar Makasar meninggalkan DPRD Kota Besar Makasar, sebagai protes terhadap diterapkannya Nasakom dan dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin.” Maka terhitung sejak 6 Agustus 1960, Abdul Wahab Radjab pun berhenti sebagai Ketua/Pimpinan DPRD Kota Makasar.

Setelah mundur dari DPRD Makassar, Wahab Radjab sempat membantu perusahaan Fadeli Luran (CV Dakota), menjadi Direksi di Bank Pembangunan Sulawesi, dan memimpin apotik Rumah Sakit Bersalin Siti Khadijah.

Selain itu, sejak tahun 1963, ia telah masuk menjadi pengurus Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra). Kiprahnya dalam pembinaan daerah-daerah, membuatnya terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah Sulselra, pada Musywil Muhammadiyah di Watampone, tahun 1966.

Proses peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, juga turut menyedot perhatian Muhammadiyah. Muhammadiyah dan ortom-ortomnya, banyak terlibat dalam upaya penumpasan PKI kala itu. Setelah Soeharto berkuasa, Muhammadiyah pun ketiban “jatah politik”, dan berubah status menjadi Ormaspol (Organisasi Kemasyarakatan dan Politik). Di setiap tingkatan legislatif, mulai dari DPRD Kota, DPRD Provinsi, dan DPR-GR, Muhammadiyah diberi jatah kursi.

Abdul Wahab Radjab diberi mandat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjadi anggota DPR-GR hingga Pemilu 1971. Selama menjalani tugas tersebut, ia tinggal di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya 62. Pada masa itu pula, Wahab Radjab ditunjuk sebagai Sekretaris Majelis Hikmah PP Muhammadiyah.

Setelah kegagalan tokoh-tokoh Masyumi merehabilitasi partai tersebut di awal masa Orde Baru, maka Muhammadiyah bersama sejumlah ormas Islam lainnya menginisiasi lahirnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Wahab Radjab pun diberi mandat untuk

membentuk partai tersebut di Sulawesi Selatan. Pada Pemilu 1971, ia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mewakili Parmusi. Disitu ia dipercaya sebagai Ketua Komisi D, yang membidangi agama, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pada masa inilah terjadi fusi Parmusi dengan partai Islam lainnya kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada Pemilu 1977, Wahab Radjab terpilih menjadi anggota DPR/MPR-RI melalui PPP. Berhubung sifat kritisnya selama menjadi anggota DPR, pada Pemilu 1982, ia tidak lagi ditempatkan pada “nomor urut jadi”. Maka berakhir pulalah karier politiknya di DPR-RI sejak tahun 1982. Setelah masa baktinya berakhir di DPR/MPR RI tahun 1982, Wahab Rajab kembali ke Makassar dan mengaktifkan diri di “rumah ibu” Muhammadiyah. Amanah terakhirnya di Persyarikatan, sebagai Penasihat PW Muhammadiyah Sulsel 1990-1995.

### **Kiprah di Muhammadiyah**

Hampir separuh hidupnya, digunakan Wahab Radjab mengabdikan di Muhammadiyah. Awalnya, ia menjadi Sekretaris Muhammadiyah Groep Bone, Limbung (1949–1951), selanjutnya sebagai Sekretaris Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, merangkap Ketua Majelis Dakwah (1961–1964).

Tahun 1964–1966, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sulselra merangkap Ketua Majelis Tablig. Wahab Rajab ditunjuk sebagai Pejabat Ketua Pimpinan Daerah Sulselra pada tahun 1966–1968. Selanjutnya, Sekretaris Majelis Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1968–1971. Ketua Majelis Hikmah PW Muhammadiyah Sulsel tahun 1971–1977; Anggota PW Muhammadiyah Sulsel tahun 1982–1985; Anggota PW Muhammadiyah Sulsel merangkap Ketua Majelis Tablig tahun 1985–1990; dan Penasihat PW Muhammadiyah Sulsel tahun 1990–1995.

Selain sebagai pengurus, Wahab Rajab juga terlibat aktif dalam pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah. Pada tahun 1948–1949, ia menjadi guru pada Madrasah Ibtidaiyah Jongaya. Tahun 1949–1950, sebagai Kepala Sekolah Menengah Islam Muhammadiyah Cabang Limbung.

Sejak tahun 1950, pengabdian Wahab Rajab di bidang pendidikan terputus karena terjun ke bidang lain. Tetapi, tahun 1982, ia kembali lagi ke dunia pendidikan dengan menjadi dosen tetap yayasan pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Tahun itu pula, ia diangkat menjadi Pembantu Rektor IV hingga tahun 1985. Selain sebagai dosen tetap yayasan dan Pembantu Rektor IV Unismuh, ia juga pernah menjadi anggota pada Badan Koordinasi Perguruan-

Perguruan Tinggi Islam Swasta Indonesia bagian Timur.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Sepak terjang Wahab Rajab dalam melawan kebodohan dengan sekolah, melawan penjajahan secara fisik, berpolitik untuk menyejahterakan masyarakat, menolak suap, dan bersikap kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan, membuat kisah hidupnya penting dibaca oleh politisi yang berlatarbelakang Muhammadiyah, maupun oleh khalayak yang tertarik untuk membaca “petite histoire” (sejarah kecil) Indonesia dari sudut pandang seorang mantan Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

### **Saran**

Diperlukan penelusuran lebih banyak tokoh-tokoh politik lokal Muhammadiyah, yang dapat memberi gambaran, kiprah kader bangsa, yang selama ini menjadi salah satu bagian dari Trilogi Kader Muhammadiyah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fatmawati. (2014). *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah Pasca Orde Baru di Makassar (1999-2004)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Furchan, A. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jurdi, S. (2011). Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006. *Jurnal: Tajdid*, Vol. 9, No. 1.

- Kaharuddin, dkk. (2019). *Laporan Penelitian 'Dinamika Sikap Politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2019: Tinjauan Sosiologi Politik'*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Maarif, A. S. (1995). Muhammadiyah dan High Politics. *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.2, Vol.VI.
- Qadir, Z. dkk. (2015). *Muhammadiyah dan Negara: Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sholikin, A. (2018). Perbedaan Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah Antara Pusat Dan Daerah. *Jurnal Polinter*, Vol. 3 No. 2.
- Suratman. (2017). *Elit Muhammadiyah dalam Politik (Studi Kasus: Kemenangan A. M. Iqbal Parewangi Sebagai Anggota DPD RI Pada Pemilu 2014)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Suwarno. (2010). *Relasi Muhammadiyah, Agama, dan Negara, Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaifullah, (1997). *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syamsuddin, M. D. (1995). The Muhammadiyah Da'wah and Allocative Politics in the New Order. *Studi Islamika Indonesia Journal For Islamic Studies*, Vol.2.No. 2.
- Taba, A. (1996). *A. Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tebba, S. (1993). *Islam Orde Baru: perubahan politik dan Kenegaraan*. Jogyakarta: Tiara Wacana.

